

BAB III

LATAR BELAKANG MUNCULNYA PEMBERONTAKAN PRRI- PERMESTA

3.1 Indonesia Menjelang Pergolakan

3.1.1 Gagalnya Sistem Politik

Awal tahun 1950-1959 terbentuknya UUDS untuk dipakai pada 17 Agustus 1950.⁴⁹ Penggunaan UUDS menimbulkan adanya pergantian yang mengikuti efek pada struktur implementasi negara, karena Indonesia sebelum 1950-an menggunakan struktur presidensial diganti menjadi struktur parlementer. Pada struktur parlementer presiden tidak lagi menjabat sebagai pemimpin pemerintahan, melainkan mendobel sebagai presiden. Dengan munculnya perubahan dalam struktur pelaksanaan negara, pada saat itu efeknya sangat luas yang bisa mempengaruhi perkembangan pemerintahan negara untuk menimbulkan pertikaian para petinggi politik, dalam hal ini Soekarno sebagai presiden terlibat di pertikaian tersebut.

Struktur kepartaian menjadi utama persyaratan UUDS yang menimbulkan menimbulkan situasi yang tidak serasi, Banyak partai bermunculan sejak awal tahun 1950-an membawa pertentangan yang berbahaya dalam tubuh bangsa Indonesia dan menjadi kenyataan pada tahun 1955. Pada jumlah pemilu pertama Partai Nasionalis Indonesia dan Nadatul Ulama mendapatkan support terbanyak khususnya di pulau Jawa, padahal partai agama yakni partai Masyumi, Partai

⁴⁹ Army, K., Melay, R., & Saiman, M. (2016). Sejarah Pembentukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 Sampai Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Di Indonesia. *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol 3, No 2. Hlm 5

Katolik, Partai Parkindo, PSI serta partai itu dominan mewakili luar pulau Jawa. Muncul jika kondisi politik itu berjalan maka Bangsa Indonesia akan menghadapi kehancuran.⁵⁰

Pada tahun 1950-an selain permasalahan kepartaian, terdapat permasalahan ketidaksamaan struktur aspek politik ditahun tersebut. Perihal muncul posisi Soekarno serta Mohammad Hatta yakni Dwi Tunggal, beliau berperan jadi tokoh kedaulatan Indonesia. Akan tetapi setelah waspada terlewat dua tokoh terkesampingkan, dua tokoh itu menggambarkan sebuah mitos dalam perjalanan Indonesia, hal ini berdampak serta kekuasaan dua itu dominan ditampilkan lewat tidak resmi

Kabinet Ali II berjabat pada tahun 1955 hingga 1957, terdapat pemusatan percobaan struktur pembagian pekerja yang mendorong agar putra daerah supaya menata kegiatan daerahnya masing-masing serta kontribusi mereka di pusat. Dengan itu Jenderal Nasution menyatakan “Ketika di Sumatera Tengah, Gubernur, Ketua Kepolisian, serta Pendakwa ialah serupa berusul dari Jakarta, hanya pimpinan militer berasal dari putra daerah”. Dengan kondisi tersebut, sistem pemerintahan tidak mempunyai sistem pengamatan yang mandiri, maka masing-masing para petinggi bisa melakukan aktivitas semaunya selama tidak berlawanan dengan golongannya. Aktivitas yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan bisa menghasilkan korupsi, dapat ditemukan dalam badan pemerintahan. Istilah yang makin hari populer di berbagai daerah itu mencakup pengertian, pengaturan

⁵⁰ Mabes TNI. Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta. (2012). Jakarta: Pusat Sejarah TNI. hlm 15

wewenang pemerintah agar pihak daerah dibenarkan mengatur rumah tangga sendiri. Selain masalah administrasi pemerintahan, pada sebutan otonomi tercatat juga permasalahan penataan finansial. Karena mengelola perihal keterkaitan dengan kebahagiaan warga. Pengaturan desa, pelantikan pendidik, pelatihan kesenian serta kebudayaan wilayah, dipandang bisa berhasil dilakukan oleh apatur daerah. Dengan perihal keterkaitan keperluan nasional, yakni ketenteraman, politik luar negeri serta perusahaan yang komponen pemerintah pusat. Dengan struktur otonomi yang meluas dapat diinginkan dari asal permasalahan dengan pusat serta daerah bisa diatasi untuk memenuhi semua golongan.⁵¹ Maka selanjutnya sistem pemerintahan yang melampau bisa dibersihkan

3.1.2 Ancaman Bahaya Komunisme

Permasalahan yang lain mendekati peristiwa PRRI-Permesta ialah permasalahan pemikiran politik. Sementara pada tahun 1952 Partai Komunis Indonesia memulai melaksanakan suatu tahapan pengambilan kekuasaan pemilahan Umum, Adanya PKI memberikan pengaruh yang dominan pada aspek politik serta aspek ekonomi.⁵² Maka sebelum tahun 1950 Partai Komunis Indonesia suka melakukan suatu kritikan kritis untuk mencemari Soekarno selaku rekan, sehingga setelah tahun 1950 PKI gemar memihak kepada Soekarno serta gemar memuji berbagaimacam kesempatan. Supaya tidak terulang kembali, untuk itu PKI berencana melaksanakan politik mendukung Soekarno. Agar salah satu lawan

⁵¹ Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta. *Op Cit.* 18-19

⁵² *Ibid.*, hlm 27

politiknya di masa revolusi fisik, dapat dipastikan lawannya meredup, yakni dari militer Tentara Nasional Indonesia, wilayah terluar Jawa serta golongan muslim.⁵³

Pemilu umum 1955 memperlihatkan kesuksesan taktik Partai Komunis Indonesia yang ada di urutan nomer 4, hal ini memberikan bukti bahwa PKI menyebarkan efeknya melalui penguatan massanya yang berasal dari kelompok SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) yang meliputi kisara 1,5 juta berasal pengikut SOBSI, maka penguatan masa dari Barisan Tani Indonesia (BTI) dan memanfaatkannya. Soekarno menginformasikan demokrasi terpimpin saat berpidato pada 27 Febuari 1957, isi dari pidato itu supaya seluruh kalangan menerima kalangan komunis agar termasuk komponen dari struktur politik Indonesia. Pada struktur tersebut, Soekarno berkeinginan terdapat Dewan “Gotong Royong” yang di isi oleh kalangan komunis supaya mendapat posisi. Secara garis besar kalangan-kalangan saling bertentangan itu dapat dibagi atas beberapa bagian yaitu: *Pertama*, kalangan ideologi serta politik; *kedua*, kalangan agama; *ketiga*, kalangan regional; *keempat* kalangan sipil-militer. Pada table dibawah ini mendeskripsikan keempat kalangan itu.

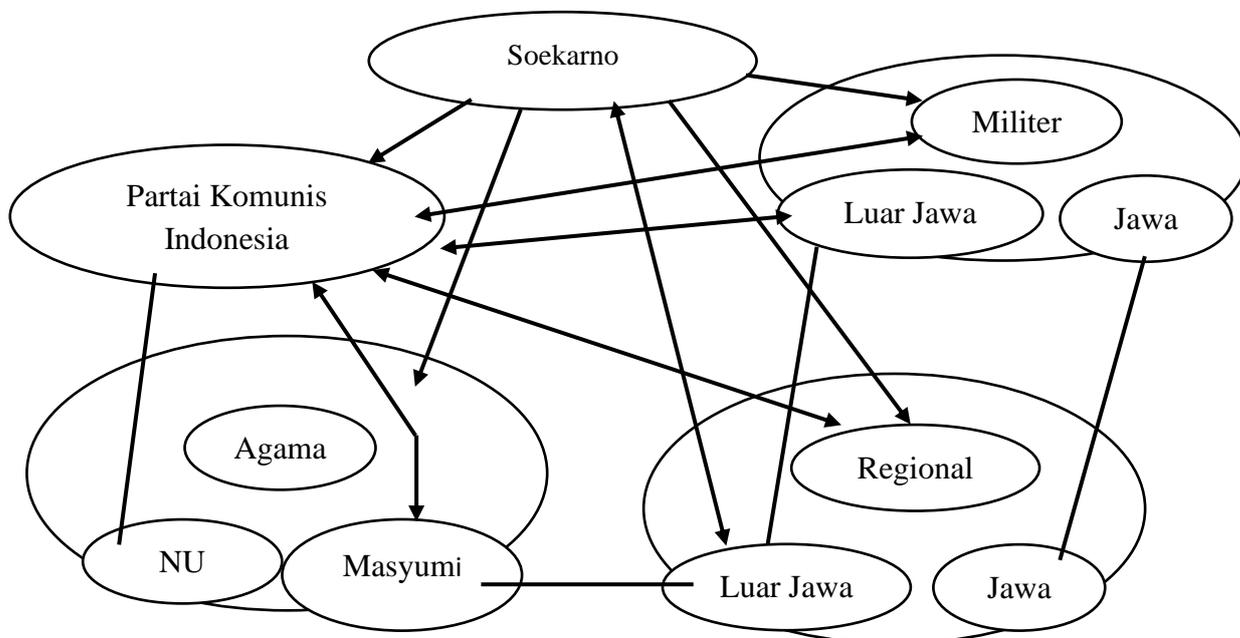
⁵³ Syamdani. (2009). PRRI Pemberontakan atau Bukan? Yogyakarta: Medpress. hlm 46.

Table 1.1
Daftar kalangan-Kalangan yang saling berlawanan selama pada
Demokrasi Liberal

Sumber: (Sumber: PRRI Pemberontakan Atau Bukan)⁵⁴

Kalangan	Tipe
Haluan Politik	Komunis ↔ Nasionalis ↔ Agama
Kepercayaan (Agama)	Islam Maju ↔ Kuno serta Kristen
Kedaerahan (Regional)	Pulau Jawa ↔ Luar Pulau Jawa
Publik (Sipil) - Militer	Publik (sipil) ↔ Militer

Keempat kalangan yang berada table di atas mempunyai penggemar yang sering antara satu dengan lainnya juga berlawanan. Soekarno sendiri terletak pada komponen tersebut. Supaya lebih bisa dipahami ikatan keempat kalangan yang bisa dilihat dari bagan dibawah ini;



⁵⁴ Syamdani., *Ibid.*, hlm 60

Gambar 2.3 Hubungan kelompok-kelompok Selama masa Demokrasi Liberal

(Sumber: PRRI Pemberontakan Atau Bukan)⁵⁵

Keterangan:

→	Berada di Bawah Pengaruh
↔	Memprotes
—	Kerjasama/Mendukung

Berdasarkan bagan di atas menyatakan seluruh kalangan yang berlawanan tetap ada di bawah pengaruh Soekarno, mau kalangan agama, kalangan militer kelompok kedaerahan serta Partai Komunis Indonesia. PKI ialah asal dari berlawanan kalangan-kalangan untuk terus dilindungi keberadaannya oleh Soekarno, maka dari kalangan yang lain muncul perlawanan kepada Soekarno. Pada awalnya kalangan-kalangan yakni militer, kaum regional serta golongan kepercayaan (agama) senantiasa berada dibagian belakang Soekarno, akan tetapi bantuan yang diserahkan Soekarno kepada Partai Komunis telah membelah suara kalangan-kalangan itu. Dari kalangan kepercayaan (agama) terdapat Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang memprotes PKI serta Nahdlatul Ulama yang sepakat untuk bekerja sama dengan PKI, sementara kalangan kedaerahan terbagi menjadi 2 komponen yakni kalangan Jawa serta luar pulau Jawa. Biarpun keretakan kalangan kedaerahan dikarenakan aspek ekonomi yang telah diterangkan sebelumnya, tetapi kontribusi Soekarno untuk membantu adanya PKI pada aspek politik Indonesia sudah menjadi pemantik supaya menambah luasnya perlawanan itu.

⁵⁵ Syamdani., *Ibid.*, hlm 61

Pada kelompok militer juga ada dua pernyataan yang berbeda yakni yang melawan serta membantu PKI, perihal itu yang melemahkan kekuasaan militer. Adanya dukungan yang dikasihkan oleh Soekarno kepada PKI memicu keretakan yang bertambah luas. Permasalahan ini ada terbentuknya golongan-golongan baru yakni golongan militer di luar pulau Jawa yang dibawah pemimpin daerah. Golongan militer yang menentang PKI yang disuarakan dengan pembentukan Gerakan Bersama Anti Komunis (GEBAK) yang dipimpin oleh kolonel Dahlan Djambek salah seorang pemimpin militer di daerah.⁵⁶ Apabila kondisi ini terus berlanjut, dengan kondisi inu serta pengembangan perjalanan Indonesia mempertambah buruk adanya pengaruh komunis yang tambah luas, maka menghadirkan kelompok kegiatan di daerah Sumatera dan Sulawesi yang diberinama PRRI-Permesta untuk melaksanakan pemberontakan.

3.1.3 Gagalnya Pembangunan Ekonomi

Dalam aspek ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 1950 terletak di posisi yang tidak stabil karena tidak seimbangny peningkatkan untuk berbagai aspek kehidupan masyarakat antara Jakarta serta daerah keluar Jawa. Sedangkan pada 1950 pembangunan mengutamakan Jakarta taatkala keseriusan pembangunan wilayah Sumatera-Sulawesi tidak stabil. Dilihat dari penulisan yang ditulis oleh S Takdir Alisjahbana pada 1956, berisikan keterangan yang menyatakan seluruh perniagaan Indonesia sekitar 71% diambil di Sumatera Tengah, dan 35% diambil dari Sumatera Selatan. Sementara Jakarta diambil +17% sisanya yakni kisaran 12% diambil dari pulau-pulau lainnya. Maka dijumlahkan ke rupiah serta rata-rata dilihat

⁵⁶ Syamdani., *Ibid.*, hlm 62

total masyarakat, tiap warga Sumatera Selatan tiap tahun menciptakan keuntungan dengan nominal Rp. 1000,-, Sumatra Tengah Rp.373,-, serta Sumatra Utara Rp.339- ,sementara Jawa serta Madura cuma memiliki keuntungan Rp. 27,50 serta wilayah lainnya Rp.67,50. Hasil nominal yang dijelaskan dapat dilihat pemerintah pusat sudah melaksanakan penyalahgunaan secara habis-habisan kepada daerah tanpa memperdulikan pembangunan serta kenyamanan daerah. Penggunaan biaya untuk diambil sebagian besar digunakan oleh mereka yang bertinggal wilayah Jakarta.⁵⁷ Sementara luar Jawa dipusatkan menjadi penghasil ekspor yakni Kayu, Kopra dan Palawija hingga tahun 1950.⁵⁸ Maka munculah kecenderungan yang oleh Permesta sebut sebagai "sentralistis”

Pada gagalnya untuk peningkatan ekonomi dialami oleh sebagian kelompok dan kalangan pada warga. Salah satu kelompok yang mengalami kesusahan akibat adanya masalah ini adalah ialah prajurit. perilaku pemerintah dalam permasalahan perdagangan yaitu penyalahgunaan sumber dana, memberikan izin keuntungan pada pengikut partai pendukungnya, dan aparat delegasi yang sangat berbelit-belit itu, membebani para pedagang. Kalangan pimpinan pasukan di berbagai wilayah pun jengkel, karena lokasi keuangan bagi operasi-operasi militer serta ketenteraman prajurit tidak berjalan dengan semestinya. Maka mereka tahapan sendiri untuk mengumpulkan biaya. Sistem yang ditempuh yakni

⁵⁷ Alisjahbana, S. T. (1957). Perjuangan untuk Autonomi dan Kedudukan Adat Didalamnja. Jakarta: Pustaka Rakjat. hlm 40-41

⁵⁸ Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta. *Op Cit.* hlm 21

memperdagangkan hasil dalam bertani tidak melewati aturan di administrasi di Jakarta. Pihak Jakarta menyebut aktivitas para panglima sebagai “pertukaran”⁵⁹

Perniagaan mandiri dari pertengahan tahun 1956 tersebut, tidak dilaksanakan melewati badan perniagaan yakni bea cukai, badan daerah tidak memberikan pajak ke Jakarta sementara dari pihak Jakarta sebaliknya. Pihak di daerah membeli alat-alat yang diinginkan dari luar Indonesia buat peningkatan daerahnya yakni membangun rute jalan serta membeli kendaraan buldoser dari penjualan hasil perniagaan itu. Aktivitas itu tidak dilaksanakan saat berita di Jakarta menginformasikan perihal keberadaan “penyuludupan” yang berlokasi di Teluk Nibung. Pemimpin Angkatan Darat dipaksa oleh Kabinett Ali Sastromidjojo II, untuk segera menghentikan aktivitas perniagaan dari Dewan Hukum Angkatan Darat.

3.1.4 Pergolakan Pada Tubuh Angkatan Darat

Sejak pengakuan kedaulatan Negara Republik Indonesia oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, kita memegang paham demokrasi liberal. Sementara itu sistem politik berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUDS) yang sudah mengakibatkan pergantian kabinet yang juga menimbulkan pergolakan di dalam tubuh Angkatan Perang Khususnya Angkatan Darat. Salah satunya perwujudan ketidaksesuaian struktur politik itu saat tragedi 17 Oktober 1952 pada tragedi ini terjadi demonstrasi di Jakarta. Menurut Kolonel Zulkifli Lubis waktu itu menjabat perwira Intelijen Biro Intelijen Staf Angkatan Perang (BISAP),

⁵⁹ Leirissa, R. Z. (1991). Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. hlm 12-13

permasalahan ini bermula dari *Nederlandse Militaire Missie*, sebuah gerombolan militer Belanda yang dipertolong oleh TNI-AD 1950. Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Ahmad Haris Nasution merupakan penyokong *Nederlandse Militaire Missie* buat membimbing Tentara Nasional Indonesia selaku berpengalaman, namun ditolak perwira lain yang dibawah kepimpinan Kolonel Bambang Supeno. Perpecahan yang mengakibatkan dua bagian ini menular ke luar Angkatan Darat, yaitu masuk ke kalangan maka memunculkan penetangan yang menerus membesar. Pihak Partai Sosialis Indonesia (PSI) membela Nasution dan Partai Nasionalisme Indonesia (PNI) membela Bambang Supeno. Dalam Parlemen, penetangan ini dipertajam lagi bersama dengan pembahasan masalah dalam tubuh Angkatan Darat yang disebabkan Pergolakan di dalam TNI-AD.⁶⁰

Permasalahan KSAD itu akhirnya bisa terselesaikan secara kemandirian oleh anggota letnan dua senior Angkatan Darat yakni Kolonel Bambang Sugeng diterima sebagai Kepala Staf Angkatan Darat yang baru saat itu. Agar menangani pergolakan di lingkungan para perwira senior AD itu, dilakukan kumpulan para panglima serta perwira senior di Yogyakarta, hasil dari musyawarah ini menghasilkan kesepakatan Yogya (Piagam Yogya) pada bulan Februari 1955. Namun, pada kesepakatan ini terjadi campur tangan Menteri Pertahanan Iwan Kusumasumantri dalam perihal pengambilalihan kedudukan panglima oleh para bawahan di Tentara Teritori-II/Sriwijaya (TT-II/Sriwijaya), TT-V/Brawijaya, TT-VII/Wirabuana. Maka berakibat, Bambang Sugeng diperintahkan untuk berhenti.

⁶⁰ Leirissa, R. Z., *Ibid.*, hlm 26

Sesudah itu, diberhentikan Bambang Sugeng digantikan dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel Lubis. Perihal permasalahan pelantikan KSAD dikembalikan ke pemerintah kepada Tentara Nasional Indonesia yang akan memilih jumlah calon itu pemerintah akan menentukan seorang KSAD.⁶¹

Pada nama-nama calon yang disusun Markas Besar Angkatan Darat dari jumlah nama perwira senior yakni Kol. Gatot Subroto, Kol. Simbolon, serta Kol Lubis. Tetapi dari tiga letnan dua yang sudah senior itu mencegah pemilihan itu. Saat kondisi tersebut, Kolonel Lubis didatangi oleh Harsono Tjokroaminoto ialah dari Partai Syarikat Islam Indonesia yang berposisi Wakil Perdana Menteri, memberi usul supaya Achmad Haris Nasution dilantik kembali menjadi KSAD. Pada awalnya, Ahmad Haris Nasution keberatan namun saat kongres kedua Nasution bersiap untuk memberikan ketentuan supaya seluruh panglima membantu. Presiden Soekarno menyetujui pemilihan itu memberikan dua ketentuan kepada Ahmad Haris Nasution, Pertama pernyataan tragedi pada 17 Oktober 1952 merupakan suatu kekeliruan, Kedua supaya Ahmad Haris Nasution membenarkan keunggulan sipil. Sebaliknya, Ahmad Haris Nasution juga memberikan ketentuan-ketentuan terhadap pemerintah, yakni supaya kebijakan perihal TNI dilakukan lewat ketetapan, serta dikasihkan biaya yang bisa memperbaiki TNI-AD.⁶²

Permasalahan baru muncul tanggal 16 oktober 1956 yakni Presiden Soekarno tiba dari perjalanan ke negara komunis dilaksanakan kongres tertutup di rumah

⁶¹ *Ibid.*, hlm 27

⁶² *Ibid.*, hlm 28

Kolonel Sukanda Bratamanggala di Jalan Martadinata. Sukanda pelatih jenderal serta Pembinaan yang mempunyai komunikasi yang luas ke perwira TNI-AD, di kongres itu perwira sedang membahas permasalahan pengembangan politik. Pada kongres ini utama perihal waspada korupsi, komunisme serta pimpinan AD. Kalangan ini dinamakan kelompok Perdamaian Nasional.⁶³ Sementara kalangan perwira Sekolah Staf Angkatan Darat memiliki kebiasaan membahas pengembangan politik di pertemuan reuni. Kalangan Korps Perwira SSKAD melakukan pertemuan kembali dalam membahas gagasan pembedahan TNI -AD, pertemuan ini intinya kalangan itu menyatakan TNI-AD ialah militer yang terbentuk saat pertempuran di kemerdekaan. Sementara pada 19 November 1956 melaksanakan pertemuan kembali ialah hal yang penting, kurun waktu 1956 yang memunculkan perpecahan pada internal TNI-AD. Tahapan yang dilakukan KSAD untuk menangani perihal pertukaran dengan *tour of duty* dilaksanakan pada tahun 1956 terlanjur memunculkan pergolakan baru yakni aktivitas letkol Abimanyu yang berjabat sebagai pemimpin di Kalimantan ada panggilan ke Jakarta serta diberikan hukuman tahanan rumah. Tahapan ini memunculkan kecemasan untuk perwira, maka memungkinkan kesatuan bangsa serta negara bisa waspada. Perilaku KSAD melanggar Piagam Yogyakarta serta keputusan kongres perwira AD yang berlokasi di Yogyakarta, aktivitas KSAD bisa memunculkan pergolakan. Maka pada pertemuan kembali dari kalangan SSKAD pada tahun 1956 menginginkan agar pemimpin AD untuk diganti.⁶⁴

⁶³ Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta. *Op Cit.* hlm 37

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 38-39

Pada pertengahan tahun 1950 krisis politik, ekonomi dan militer melonjak di bulan November 1956. Tahapan pembenahan terus terwujud dalam situasi yang bertambah tidak stabil menimbulkan suatu aktivitas di kedaerahan yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi yang menamakan PRRI-Permesta suatu kelompok yang dibentuk untuk memprotes kinerja pemerintah pusat

3.2 Munculnya Kelompok Permesta dan Kelompok PRRI

3.2.1 Perjuangan Rakyat Semesta di Sulawesi

Seluruh perkembangan di Sulawesi selalu di perhatikan secara waspada oleh pimpinan TT/Wirabuana, Letkol Kolonel Sumual mengetahui kondisi di wilayahnya, khusus di Sulawesi sedang berkembang ke arah perpecahan. Masalah yang dihadapinya bukan sekedar masalah atau kesejahteraan prajurit saja. Keadaan Indonesia Timur membuktikan suatu hal yang sudah lama diketahui Letkol Kolonel Sumual selaku panglima TT VII/Wirabuana. Wilayah ini secara administratif dan politik masih keadaan stabil tetapi penghubung ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia masih belum layak, dalam struktur administrasi pemerintahan masih lemah. Karena adanya gangguan keamanan yang disebabkan oleh kelompok DI/TII Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan lain-lain. Keadaan ini menyebabkan gerakan-gerakan otonomi muncul dalam masyarakat yang justru meningkatkan keadaan bahaya.

Suatu kesulitan yang sudah diantisipasi ialah sikap pimpinan TNI-AD yang mungkin juga tidak akan menerima tindakan mereka. Tetapi resiko harus dihadapi. Selain itu, banyak perwira staf TT VII/Wiarabuana terutama panglimanya, sudah beranggapan begitu lama pimpinan TNI-AD tidak berwibawa lagi dan perlu diganti

sesuai yang dirumuskan di dalam Reuni SSKAD pada November 1956. Maka, pada Februari 1957 keyakinan kemauan para perwira TT VII/Wiarabuana untuk mengambil alih tindakan penyelamatan dari kekacauan dalam wilayah hukumnya

Untuk mengambil Langkah-langkah penyelamatan itu, para perwira-perwira TT VII/ Wirabuana memutuskan untuk membentuk suatu panitia yang akan diperintahkan menyusun suatu rencana kerja menyeluruh yang mencakupi masukan-masukan dari masyarakat seperti dititikberatkan ke pemberdayaan Tenaga, serta rencana TT VII sendiri. Panitia yang dibentuk sekitar pertengahan Februari 1957 yang dipimpin oleh Letkol Saleh Lahade, dan didalamnya terdapat Letkol dr. O.E Engelen, Letkol Andi Mattala, Mayor M Jusuf, Mayor W.J. Gerungan, Mayor Her Tasning, Mayor Sjamsuddin, Mayor Eddy Gagola, Kapten Bing Latumahina, Kapten Lendy Tumbelaka, Kapten John Ottay, dan Kapten Arie Supit. Para panitia mengadakan rapat pada kesokan harinya di kediaman Eddy Gagola, di rapat ini rencana yang dikenal sebagai Piagam Perjuangan Semesta disusun.⁶⁵

Pada 2 Maret 1957 berlokasi di kantor Gubernur UjungPandang berlangsung pertemuan yang dihadiri oleh tokoh militer dan pejabat seperti Letkol Kolonel Sumual, Letkol Saleh Lahade, Andi Pangerang Pettarani (Gubernur Sulawesi), Mayor Muhammad Jusuf Amir, Henk Rondonuwi (Anggota Komite Eksekutif Dewan Penasihat Pusat Permesta), maupun sipil daerah tersebut. Pertemuan ini menghasilkan “Piagam Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta)” dibawah pimpinan

⁶⁵ *Ibid.*, hlm 96

Panglima TT-VII Letkol Kolonel Sumual.⁶⁶Dari pembentukan piagam permesta karena rasa tidak puas masyarakat Sulawesi terhadap sistem politik yang dijalankan pemerintah pusat yang seolah-olah bahwa pemerintah pusat mengabaikan hak-hak masyarakat Sulawesi maupun aspirasinya. Masyarakat Sulawesi merasa mendapat perlakuan yang tidak adil, karena adanya ketimpangan antara pusat dan daerah maka ketidakharmonisan ini sampai kepada masalah pemerintahan. Secara rahasia Permesta juga mengadakan hubungan dengan Badan Banteng di Sumatera Tengah, dan mengadakan persiapan untuk melakukan pemberontakan. Pihak Komando Daerah Militer Sulawesi Utara (KDMSUT) mengeluarkan pernyataan mendukung PRRI. Pemberontakan Permesta sebagai hal ketidakpuasan terhadap aspek ekonomi dan administrasi yang cenderung di pulau Jawa. Kondisi yang gawat ini lebih dikacaukan lagi setelah Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara (KDMSUT) Letkol Daniel Julius Somba pada tanggal 17 Februari 1958 menyatakan bahwa Sulawesi Utara memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat.⁶⁷

3.2.2 Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera

Peristiwa pengambilalihan kewenangan di Sumatera Tengah tanggal 20 Desember 1956 ialah dimulainya kekacauan dalam pergolakan, pengambilalihan kewenangan yang dipegang oleh Ruslan Mulyono sebagai Gurbanur terhadap pimpinan badan banteng yakni Letnan Kolonel Ahmad Husein. Sejak itu, mau itu kekuasaan militer ataupun kekuasaan sipil dipegang oleh Letnan Kolonel Ahmad

⁶⁶ Leirissa, R. Z., *Ibid.*, hlm 92-95

⁶⁷ Sejarah TNI Jilid II (1950-1959), *Op.Cit.*, hlm 188-189

Husein.⁶⁸ Maka adanya kekacauan yang terjadi di Sumatera Soekarno sebagai presiden, dengan bantuan Jenderal Nasution untuk mengirim kelompok militer Angkatan Udara, Angkatan Laut serta Angkatan Darat untuk menumpas PRRI. Begitu juga yang dilakukannya terhadap Permesta di Sulawesi. Gerakan PRRI yang militernya dipegang oleh Ahmad Husein membuat pernyataan dengan dibentuknya ialah pemerintahan perlawanan, tidak negara baru. PRRI menganggap kecewa dengan politik Soekarno saat itu yang secara nyata mengajak Partai Komunis Indonesia untuk berada di Kabinet.⁶⁹

Pada tahun 1958 mulai tahapan rapat di yang berlokasi di Sungai Dareh, suatu kota yang berlokasi ke arah tenggara Sumatera Barat. Pada rapat ini dihadiri oleh tokoh militer serta politik yakni Kolonel Zulkifli Lubis, Letnan Kolonel Ahmad Husein, Kolonel Simbolon, Letnan Kolonel Berlian, Letnan Kolonel Ventje Sumual, Letnan Kolonel Dahlan Djambek, Sjafrudin Prawinegara, Soemitro Djojohadikusumo serta Muhammad Natsir rapat dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 13 Januari tahun 1958, dalam rapat ini tokoh politik melibatkan pengaruhnya dengan nyata. Selain itu, terdapat tokoh partai Masyumi serta PSI dirapat ini tidak sekedar hadir saja namun berkontribusi saat mendefinisikan ketentuan yang selanjutnya dihasilkan oleh rapat tersebut. Rapat yang dilaksanakan di Sungai Dareh ialah kemajuan Piagam Palembang, sementara piagam itu ialah gugatan badan Banteng.⁷⁰

⁶⁸ Idris, S., *Op Cit.* hlm 189

⁶⁹ Idris, S., *Op Cit.* hlm 158-159

⁷⁰ Idris, S., *Op Cit.* hlm 16

Awal direncanakan kongres besar di Padang pada 8 Febuari 1958, tapi dibatalkan karena hujan maka itu rapat dilaksanakan pada 10 Fenuari yang dihadiri oleh ratusan warga kota Pandang. Kongres berjalan di kediaman rumah Gurbenur Sumatera Tengah kongres bisa dianggap sebagai kongres terbesar yang menghadirkan banyak orang. Dalam pidatonya Achmad Husein melepas tandapangkatnya dan melemparkannya kepada hadirin, Achmad Husein memberikan kesan jika ia terlibat di Dewan Banteng tidak sekedar mendapat gelar, tapi buat membangun daerah. Perihal gelar itu taro kembali ke bahunya oleh salah satu warga yang hadir.⁷¹ Sambil berpidato Husein berpantun utuk menyampaikan kesenjangan antara pemerintah pusat serta daerah. Dipemerintah pusat orang menikmati pembagunan dengan kemakmuran serta keceriaan, sedangkan di luar Jawa kesenjangan pembangunan, “Di langit hari yang hujan, dibumi setetes tiada”. Achmad Husein menyatakan pantun ialah konsep naskah yang gampang dipahami dalam pikiran warga padang. Maka Achmad Husein mengetahui itu, Gemuruh hadirin sampai ke atas dibarengi bunyi suara tepuk tangat saat mengetahui pantun dibacakan. Pada rapat umum yang dilaksanakan 10 Febuari 1958 dibacakan peringatan kepada Kabinet Djuanda serta Presiden Soekarno yang menyatakan

1. Agar dalam jangka 5 x 24 jam setelah ketentuan tersebut diinformasikan:
 - a. Dewan Djuanda harus menyerahkan amanat kepada Penjabat
 - b. Penjabat Presiden mencabut mandat Dewan Djuanda
2. Segera setelah ketentuan pada rangka pertama dilakukan agar Hatta serta Hamengkubuwono dipilih buat membetukan pertama *zaken* kabinet nasional

⁷¹ Idris., *Ibid*

mengambil syarat hukum, terdapat sosok yang diketahui masyarakat serta disiplin, tegas serta dihargai dan suci dari komponen tidak baik dari pencipta.⁷²

Jika isi peringatan tidak dipatuhi, Ahmad Husein membuat pernyataan tidak terhubung lagi pada pemerintah pusat. Ia serta teman-teman akan melalui jalan pribadi dalam melaksanakan keinginan perjuangan. Para hadirin yang datang saat rapat itu totalnya ratusan,

Pada 11 Februari 1958, Djuanda sebagai perdana Menteri melaksanakan kongres kabinet yang turut datang ialah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara Suryadi Suryadarma serta Sekretariat Jenderal Kementerian Perhatahanan Kolonel Hidayat. Pada kongres ini menyatakan secara tegas menolak tuntutan Ahmad Husein, selain itu diterbitkan juga pelepasan dinas kemiliteran yakni Letnan Kolonel Ahmad Husein, dan Kolonel Zukifli Lubus, Kolonel Dahlan Djambek, serta Kolonel Maludin Simbolon. Dengan pengikaran tuntutan ini menganggap sudah memiliki firasat bakal di tolak, penolakan tuntutan ini mengakibatkan keseriusan Ahmad Husein sebagai ketua Dewa perjuangan untuk bergejolak. Sementara 15 Februari 1958 dideklarasikan pembetulan suatu gerakan untuk memisahkan diri dari Indonesia gerakan ini diberinama PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dengan di Deklarasikan gerakan ini untuk menjawab karena tuntutan yang diberikan Kolonel Achmad Huseim tidak respon balik oleh pemerintah pusat. Dalam gerakan ini anggotanya yakni Perdana Menteri Sjafrudin Prawinegara, duduk dalam PRRI seperti Kolonel Maludin

⁷² Idris., *Ibid*

Simbolon, Asaat, Burhanuddin Harahap, Mohammad Sjafei, Soemitro Djojohadikusumo Gerakan ini didirikan di Bukittinggi Sumatera Tengah.⁷³

3.2.3 Badan-Badan di Sumatera

Pada tahun 1955 Indonesia melaksanakan pemilu pertamanya, dipemilu ini Partai Komunis Indonesia menerima dukungan terbanyak hingga bertengger di posisi ke 4, dengan PKI posisi ke 4 menyebabkan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia gelisah. Sedangkan di wilayah yang berada di luar pulau Jawa selalu tidak menerima adanya pembangunan yang dipusatkan di pulau Jawa saja, dipertambah sebagian pemimpin militer di wilayah mulai memberontak. Selanjutnya, ada penyusupan yang dilakukan di Sumatera aktivitas ini dilakukan oleh kalangan militer yakni Kolonel Simbolon. Aktivitas yang dilakukan oleh Kolonel Simbolon didukung warga Sumatera sebab memedulikan kesejahteraan warga Sumatera.

Informasi tanggal 20 hingga 24 November 1956 melaksanakan pertemuan kembali Koprns Banteng yang berlokasi di Padang, pertemuan ini menilai hasil kemerdekaan serta membuat kesimpulan yang menyatakan “Indonesia setelah enam tahun merdeka perihal pembangunan tidak merata hal ini dirasakan oleh daerah di luar pulau Jawa. Untuk itu warga mengukir sehingga pemerintah pusat tidak kuat menangani perihal tidak meratanya pembangunan, pada tahun 1956-1957 secara berurutan kemunculan para badan-badan di pulau Sumatera⁷⁴. Badan ini muncul di pulau Sumatera yaitu badan Banteng di Sumatera Utara yang dibawah kepemimpinan oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein, badan Gajah di Sumatera Utara

⁷³ Idris., *Ibid.* hlm 17-18.

⁷⁴ Sejarah Penumpasan Pemberontakan PRRI/Permesta. *Op Cit.* hlm 41

yang dibawah kepemimpinan Kol, Sombolon, badan Garuda di Sumatera Selatan dibawah kepemimpinan Letnan Kolonel Berlian.⁷⁵ Mulai muncul kalua politik dalam negeri ini berjalannya waktu menuju pada perlawanan ke pemerintah pusat yang digerakan dari wilayah luar pulau jawa serta membutuhkan gerakan yang penting buat memberantas

Pada 11 September 1957 Djuanda sebagai Perdana Menteri melaksanakan Musyawarah Nasional serta dihadiri petinggi pemerintah serta militer termasuk perwira yang dianggap melawan, permasalahan politik dibacakan serta membentuk suatu panitia yang diberinama “Panitia tujuh” buat mengamati para perwira yang melawan, 1 bulan selanjutnya melaksanakan musyawarah pembangunan buat mengatasi permasalahan pada aspek ekonomi namun kedua acara itu tidak bisa menangani perlawanan yang terjadi di pulau Jawa-luar Pulau Jawa.⁷⁶ Sementara terdapat berita percobaan pembunuhan kepada Soekarno dalam tragedi di wilayah cikini yang berada di Jakarta pada 30 November, menyebabkan kekerabatan antara Sumatera Barat serta pemerintah pusat terus bergejolak peristiwa Cikini ialah rencana penanganan yang dilaksanakan oleh Perdana Menteri Djuanda. Dalam tragedi ini pihak pemerintah pusat serta TNI-AD menganggap para perwira yang melawan merupakan pelakunya. Maka itu perwira yang melawan ini mempertanggungungkan perbuatannya.

Pelaksanaan pertemuan mengenai pertimbangan yang dilakukan di Sumatera Barat, hasilnya ialah melaksanakan Rapat yang terletak di Sungai Dareh dalam

⁷⁵ *Ibid.*, hlm 65-74.

⁷⁶ Leirissa, R. Z., *Ibid.*, hlm 68-71

dalam rapat ini menghasilkan forum baru yakni menggabungkan sebagian wilayah yang sedang bergejolak di Sumatera serta Sulawesi sambil membuat badan perjuangan. Badan Perjuangan dibawah kepemimpinan Ahmad Husein dari badan Banteng serta badan perjuangan juga hadir dan terdapat tokoh Masyumi yakni Sjafrudin Prawinegara dan Mohammad Natsir, Buranudin Harahap yang saat itu dipindagkan ke Padang sebab ada dorongan Partai Komunis Indonesia. Rapat yang dilaksanakan di Sungai Dareh membahas perihal kertekaitan pengamanan yang dilaksanakan saat pertemuan secara sembunyi dalam pertemuan ini menghasilkan permintaan untuk membentuk kabinet yang memiliki berkemampuan untuk menangani kekacauan antara Jakarta serta wilayah luar Jakarata. Perihal kabinet diisi oleh orang yang bisa dipercaya oleh wilayah yang bergejolak yakni Hamengkubuwono IX serta Mohammad Hatta, jika dua nama itu memegang kabinet keinginan untuk menyelesaikan masalah antara Jakarta serta Wilayah luar Jakarta bisa terlaksana.

Berdasarkan penjelasan diatas, membuat penulis berpendapat bahwa Perlawanan yang terjadi di Sulawesi yang menamakan kelompok PRRI-Permesta di Sulawesi dan Sumatra disebabkan karena suasana aspek politik Indonesia tidak seimbang, berbarengan atas bertumbuhnya PKI serta peningkatan pembangunan perekonomian yang tidak setara yang terpusat di Jakarta. Pihak luar Jawa mengharapkan pemusatan diubah ke terlokasi, maka tahap memberikan kemandirian daerah seluasnya terhadap wilayah di daerah-daerah. Untuk permasalahan ini mengakibatkan pemberontakan PRRI-Permesta yang dipimpin oleh para badan perjuangan di Sumatera menganggap tidak sama oleh pemerintah

yang di Jakarta, bila pemerintah yang di Jakarta mengimplementasikan struktur terpusat serta tidak mengawasi peningkatan di daerah terutama Sulawesi serta Sumater akan mengakibatkan perlawanan yang dilaksanakan oleh kelompok PRRI-Permesta. Gerakan pemberontak yang terjadi di Sumatera dan Sulawesi merupakan kesesuaian sebuah proses pemisahan budaya, etnis, suku, agama, ras dan pemerintah dari kelompok yang lebih besar, hal itu berkaitan dengan teori separatisme yang diusung oleh Doyle.⁷⁷ Gerakan Separatisme yang terjadi Sumatera dan Sulawesi berkeinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia, kemunculan gerakan pemberontak karena gagalnya sistem politik, ancaman bahaya komunisme, peningkatan pembangunan perekonomian yang tidak setara yang terpusat di Jakarta dan pergolakan pada tubuh Angkatan darat. Dalam peristiwa ini kelompok PRRI-Permesta membentuk pemerintahan tandingan sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah pusat.

⁷⁷ Widodo, A., & Drajadi, H. S. (2022), *Loc. Cit.*, Hlm. 4-5.